

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Saat ini kondisi negara sedang dalam keadaan yang memprihatinkan, bencana demi bencana terjadi di negara Indonesia tercinta ini. Krisis ekonomi sudah bukan menjadi barang baru lagi. Sebagaimana dikutip dari *website* Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyebutkan bahwa kunci keberhasilan membangun sebuah negara tak lepas dari keteraturan pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan amanat undang - undang, tugas pengelolaan keuangan Negara diemban oleh Departemen Keuangan (Dep.Keu) dimana realisasi penerimaan dan pengeluaran kas negara berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dibentuk pada tahun 2004.

Pada periode dimana fasilitas perbankan belum dimanfaatkan, penerimaan dan pembayaran dana negara dikelola oleh Departemen Keuangan melalui Kantor Kas Negara sepenuhnya. Kantor Kas Negara inilah yang menerima setoran pajak maupun non-pajak, serta membayarkan gaji pegawai negeri maupun kewajiban pada rekanan negara. Sementara, di sisi lain, penyetor pajak dan bukan pajak harus datang ke Kantor Kas Negara untuk mengisi formulir dan melakukan pembayaran. Formulir yang digunakan untuk mengisi setoran pajak dan bukan pajak akan diisi kemudian dimasukkan ke dalam mesin tera yang berfungsi untuk mengesahkan pembayaran tersebut, sekaligus sebagai bukti dana yang bersangkutan telah masuk ke kas negara. Namun sejak tahun 1988, pola penyetoran dana negara kemudian berubah dengan penerapan *giralisasi* dimana Dep.Keu mulai menggunakan jasa perbankan dalam proses penyetoran dana negara.

Dalam *website* Direktorat Jenderal Perbendaharaan menceritakan pada akhir tahun 1990-an sistem penerimaan negara kemudian dilengkapi dengan teknologi komputerisasi yang sifatnya 'stand alone' terpisah dari sistem komputerisasi bank yang digunakan jasanya oleh Dep.Keu. Sistem pencatatan yang dikembangkan ini disebut *Sistem Penerimaan Negara (SISPEN)*. Pada masa itu yang mengelola adalah Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara, pada periode yang kurang lebih sama, penggunaan Teknologi Informasi semakin berkembang di lingkungan Departemen Keuangan seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mengembangkan sistem *Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3)* serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengembangkan sistem *Electronic Data Interchange (EDI)* untuk melayani kalangan eksportir maupun importir.

Dari ketiga sistem yang dikembangkan oleh unit di lingkungan Departemen Keuangan tersebut, MP3 yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan sistem yang sangat membantu kalangan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Melalui bank-bank persepsi rekapitulasi penerimaan negara dari sektor pajak dapat langsung dilihat dan dimonitor oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sistem ini juga dimaksudkan untuk menerima setoran dari para pelaku yang terkait dengan bea dan cukai. Kerja sama tersebut membuat sistem MP3 menjadi lebih lengkap dengan tambahan pelaporan pembayaran dari bea dan cukai. Hal tersebut dapat digunakan oleh Presiden dan Departemen Keuangan untuk dapat langsung memantau penerimaan negara dari sektor pajak dan sektor bea dan cukai.

Seperti dikutip dari sebuah artikel¹ mengenai peranan *information and communication technology (ICT)* dalam kaitannya dengan *e-Government*, dalam sebuah seminar, seorang pakar telematika mengungkapkan :

¹ Ade Rachmawati Devi, Kodrat Setiawan, dan Houtmand P. Saragih, "Penerapan e-Government : Melompatlah, Jika Tidak Ingin Tertinggal", Website warta-egov (10 Januari 2006): 1.

"Besarnya peranan *information & communication technology (ICT)* terhadap peningkatan perekonomian suatu negara bukan merupakan omongan kosong. Survei yang dilakukan *International Telecommunications Union (ITU)* di beberapa negara Asia, Afrika, dan Amerika menyebutkan penambahan akses teknologi informasi dan telekomunikasi sebesar 1% akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan sebesar 3%. Di samping itu, negara-negara yang gencar memanfaatkan ICT terbukti kian maju."

Dalam sebuah artikel lain yang ditulis oleh Satriya² mengatakan bahwa :

"Implementasi *e-Government (e-gov)* di Indonesia mengalami kemajuan, namun kemajuan yang dicapai masih pada tingkat dasar tahapan pelaksanaan *e-gov* yang baru meliputi peningkatan kemampuan organisasi pemerintahan dan publik dalam mengakses informasi. Dengan kata lain belum terjadi komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan publik masyarakat, apalagi pertukaran *value* secara maksimal yang menjadi ciri transaksi *e-gov* melalui portal yang informatif".

Namun dengan pengembangan Teknologi Informasi pada masing-masing direktorat tersebut diatas, yaitu *SISPEN*, *MP3*, maupun *EDI* menimbulkan hambatan. Tidak adanya integrasi antar sistem yang dibuat terutama bagi pihak bank yang harus mengelola mekanisme masing-masing sistem tersebut. Padahal selain teknis pengolahan data ketiga sistem tersebut berbeda, teknologi yang diterapkan juga memiliki perbedaan dalam hal sistem operasi-nya. *SISPEN*, misalnya, masih menggunakan DOS atau teknologi komputerisasi yang tergolong kuno dalam memproses seluruh data transaksi penerimaan. Penggunaan teknologi semacam ini, selain menimbulkan keraguan terhadap validitas data, juga membuka celah untuk kesalahan pencatatan dari pihak bank. Padahal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN sebagai pemegang kas negara berpegang pada laporan yang diberikan oleh pihak bank. Akibatnya, saat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibentuk pada tahun 2004 melakukan tugas pencatatan terhadap *output* ketiga sistem diatas yang tidak

² Eddy Satriya, "Pentingnya Revitalisasi e-Government di Indonesia", Website Bappenas, (Mei 2006): Abstrak, 38.

dapat direkonsiliasi, sehingga pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dinyatakan *disclaimer* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dikutip dari website Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyebutkan bahwa berbekal permasalahan tersebut, maka dibuatlah sebuah terobosan untuk pencatatan penerimaan negara yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dalam suatu kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, serta Sekretariat Jendral, berupa suatu modul yaitu *Modul Penerimaan Negara* atau dikenal dengan *MPN-PrimA*. *MPN-PrimA* memiliki sistem yang terintegrasi dengan sistem perbankan serta dengan adanya Central Database di Departemen Keuangan untuk transaksi penerimaan yang dapat diakses oleh unit-unit terkait di lingkungan Departemen Keuangan. Dengan *MPN-PrimA*, pihak bank hanya perlu melakukan satu kali input dimana hasil peng-inputan tersebut dimasukkan ke suatu database yang telah tersedia dan terkoneksi dengan Departemen Keuangan. *MPN PrimA* juga memberikan 'kepastian' karena cukup dengan satu kali pemrosesan, sistem ini akan mengoneksikan 87 bank dengan lebih dari 12.000 cabangnya dan secara otomatis akan menampilkan data dengan validitas yang terjamin ke Departemen Keuangan. Sedangkan fasilitas e-Banking yang berteknologi tinggi dan terpercaya akan 'memudahkan' masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya kapan saja dan dimana saja. *MPN-PrimA* diharapkan mampu menjawab tantangan untuk penerapan sistem pengelolaan keuangan di negara yang modern. *MPN-PrimA* diharapkan dapat memberikan 'kemudahan' dan 'kepastian'.

B. Perumusan Masalah

Penulisan dengan judul “ Modul Penerimaan Negara (MPN) sebagai Implementasi *e-Government* : Dampak Penerapannya Terhadap Pelayanan Kepada Wajib Pajak ” akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Sebagai suatu implementasi e-Government, bagaimana pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) terkait dengan pelayanan kepada Wajib Pajak ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak ?
3. Apa yang menjadi pokok kebutuhan terkait adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh Modul Penerimaan Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ditentukan dari berdasarkan permasalahan dari penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan dapat menganalisa pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara terkait dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelayanan kepada Wajib Pajak.
3. Memberikan masukan tentang pokok kebutuhan terkait adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh Modul Penerimaan Negara.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi kalangan pemerintahan diharapkan penelitian ini akan memunculkan ide atau gagasan untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang baik terutama kaitannya dengan penerimaan negara, sehingga tujuan untuk membentuk suatu koridor manajemen informasi dalam rangka penerapan *e-gov* dapat tercapai.
2. Bagi kalangan akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih yang berharga dalam rangka menjembatani dunia praktek dan akademik sehingga menciptakan kesinambungan antar keduanya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan ini akan dicoba untuk memilah pembahasan ke dalam suatu sistematika yang mempunyai tujuan untuk lebih mempermudah siapapun yang membaca hasil penulisan ini sehingga akan tergambar jelas apa yang merupakan keselarasan dari seluruh isi penulisan ini. Adapun gambaran umum yang akan dibahas dalam penulisan ini secara sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mencoba menceritakan latar belakang permasalahan dari penulisan ini, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang secara garis besar akan

membuka cakrawala yang akan ditemui dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan hal-hal yang menjadi landasan teori dari penulisan ini. Secara garis besar kerangka teoritis diambil dari tinjauan atas beberapa pustaka sebagai referensi diantaranya adalah tentang perpajakan dan juga teknologi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam bab ini juga akan membahas tentang metodologi yang dipakai oleh penulis dalam kaitannya dengan pengumpulan data-data yang mendukung penelitian ini.

BAB III : MODUL PENERIMAAN NEGARA

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum dari objek yang diteliti, termasuk latar belakang dan sejarah hal-hal yang terkait dengan objek penelitian

BAB IV : MODUL PENERIMAAN NEGARA SEBAGAI BENTUK PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam bab ini penulis akan membahas secara jelas apa yang menjadi objek penelitian disertai dengan data-data yang didapat melalui metodologi penelitian, sehingga diharapkan dari bab ini adalah tercapainya tujuan dari penelitian ini. Dalam bab ini juga

akan coba dibahas tentang usulan penulis terhadap perkembangan dari objek penelitian agar dapat lebih baik.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh isi pembahasan penulisan ini. Dalam bab ini juga diberikan saran-saran yang dapat memberikan sumbangsih yang berguna untuk kemajuan bersama bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait baik pelaku dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik bagi peneliti ataupun penulis selanjutnya.